

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Andasasmita, Komar, 1987, *Serba-Serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktik) Cetakan Ke-3*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- , 1989, *Suplemen Leasing (Teori dan Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwari, Achmad, 1987, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Harlien, 2006, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D., Rahmawati Hidayati, dkk., 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Garner, B.A., 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, Dallas.
- H.S, Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co., Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1984, *Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum: Lembaga Keuangan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang.
- , 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1996, *Leasing dan Permasalahannya*, Effhar Offset, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Rammelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Salim, P., 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary Edisi Keenam*, Modern English Press, Jakarta.
- Satrio, J., 1999, *Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekandi, Eddy P., 1990, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jakarta.
- Subekti, R., 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

- , 1985, *Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- , 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sukardi, 2006, *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi, 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugandhi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Supit, Frank Taira, 1982, *The Legal Aspects of Leasing*, Institute for International Research.
- Syahrani, Ridwan, 1985, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tunggal, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Utrecht, Ernst dan Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usanti, Trisadini P., *et.al.*, 2012, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

B. Artikel Jurnal

- Budyatmojo, Winarno, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan), *Yustisia*, Edisi 86, Mei-Agustus 2013.
- Danindra, Praditia, “Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Mewujudkan Rasa Keadilan: Suatu Putusan di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2, Mei 2010, hlm. 120.

Noormansyah, Doddy, “*Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1, Februari 2006.

Respationo, HM Soerya, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII, Mei – Agustus 2013.

Soeikromo, Deasy, “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21 No. 5, Januari 2016.

Supriyadi, “Kedudukan Benda Setelah Putusnya Perjanjian *Financial Lease* Antara *Lessor* dan *Lessee*”, *MMH*, Jilid 41 No. 4, Oktober 2012.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “Lahirnya Hak Kebendaan”, *Perspektif* Vol. XVII No. 1, Januari 2012.

Wantu, Fence M., “Antimoni dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

C. Makalah/Bahan Kuliah:

Prevot, Piere. “Pengertian, Sifat, dan Jenis *Leasing*”, Kursus *Leasing* Angkatan Angkatan II Tahun 1984.

D. Internet:

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2013”, <<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413>>, diakses 21 Agustus 2017.

Down to Earth, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, <<http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/nota-kesepahaman-mou-indonesia-inggris-mengenai-penebangan-kayu-liar>>, diakses pada 28 September 2017.

Hatta, Raden Trimurtia, “Kebutuhan Kendaraan di Indonesia Naik 15% (lima belas persen)”,

<<http://www.centroone.com/news/2012/08/1m/kebutuhan-kendaraan-di-Indonesia-naik-15/>>, diakses 21 Agustus 2017.

Hidayat, Firman, ‘Angkut Kayu Meranti Ilegal, Tiga Sopir Truk Ditangkap’,
<<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/20/063848256/angkut-kayu-meranti-ilegal-tiga-sopir-truk-ditangkap>>, diakses pada 18 September 2017.

Maulana, Sapri, ‘Pembalakan Liar, 2 Tersangka Disergap di Sungai Mahakam’,
<<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/24/058878130/pembalakan-liar-2-tersangka-disergap-di-sungai-mahakam>>, diakses pada 18 September 2017.

World Bank Group, “Laporan Triwulan Perekonomian Indonesia Maret 2017: Melanjutkan Perbaikan”,
<<http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-march-2017>>, diakses tanggal 15 September 2017.

WW, Karana, ‘Aparat Polda Kalteng Sita 1400 Log Kayu Hasil Pembalakan Liar’,
<<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/08/28/058903905/aparat-polda-kalteng-sita-1400-log-kayu-hasil-pembalakan-liar>>, diakses pada 18 September 2017.

E. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambaan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1169/KMK.01/1999 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan, Sitaan dan Rampasan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor E2.UM.01.06 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

F. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 79/Pid.B/2005/PN.Kgn.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 71/Pid/2005/PT.Bjm.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2257 K/Pid/2005.